BAB IV

KESIMPULAN

Keadaan perfilman Indonesia sejak awal kemunculan pada masa Hindia Belanda tidak pernah lepas dari peraturan yang diatur oleh penguasa yang menjabat saat itu. Film memegang peran penting karena film adalah sebuah komunikasi massa yang mudah diserap masyarakat sehingga peredarannya harus dikendalikan guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tersebar ke masyarakat.

Krisis perfilman yang ditinggalkan rezim Orde Lama membuat Presiden Soeharto berusaha keras memperbaiki perfilman Indonesia. Diawali dengan dibukanya keran film impor secara besar-besar untuk melakukan *supply* kepada bioskop-bioskop agar tidak gulung tikar. Setiap film impor yang masuk dikenai biaya pada setiap judul yang masuk, tarif tertinggi pada masa jabatan Menteri Penerangan Harmoko yang mematok harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per judul film yang masuk dan biaya copy film sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bukan tanpa alasan pemerintah Orde Baru melakukan biaya masuk film impor. Biaya tersebut digunakan untuk menghimpun dana guna membiayai perfilman Nasional misalnya dengan peraturan wajib produksi film Nasional pada importir film, pada perkembangannya hasil biaya impor tersebut juga menjadi dana taktis Menteri Penerangan.

Kebijakan Soeharto umumnya berhasil menghidupkan kembali perfilman Indonesia terlihat dari dekade 1970-an, 1980-an dan 1990-an. Pada tahun 1990 roduksi film Indonesia berada dalam masa stabil bahkan pada tahun 1990 jumlah

produksi mencapai 112 film.

Film impor yang banyak beredar ketika Orde Baru didominasi oleh film-film dari *hollywood,* Amerika. Film-film ini hadir dalam sentuhan budaya barat yang kental akan adegan dengan unsur pornografi diramu dengan teknologi canggih film *hollywood* berhasil memikat penonton Indonesia. Jika dilihat dari jumlahnya film nasional tidak pernah lebih banyak dari film impor.

Fenomena ini mempengaruhi para sineas untuk membuat film dengan unsur pornografi yang disukai masyrakat hal ini didukung dengan keadaan saat itu yang sulit membuat film bernada serius karena sensor pemerintah Orde Baru sangat ketat terhadap film yang berisi kritik sosial dan yang mengancam kerukunan bangsa Indonesia,seperti contoh film *Max Haveelar* yang dilarang tayang karena dianggap mendiskreditkan pribumi sebagai sosok yang jahat.

Pada akhirnya film Indonesia banyak dibuat dengan memuat unsur pornografi sebagai bumbu pelengkapnya. Pengertian pornografi dalam penelitian ini adalah segala bentuk karya seni berupa gambar, suara atau adegan yang dapat membangkitkan imagi seks. Dalam film umumnya unsur pornografi digambarkan melalui adegan seks, pengambilan gambar secara dekat beberapa bagian privat tubuh seperti payudara dan paha. Akan tetapi, seiringnya berjalannya waktu unsur pornografi bukan lagi tampak sebagai bumbu pelengkap melainkan sebagai bumbu utama dan ditampilkan secara eksplisit terutama pada dekade tahun 1980-an sampai 1990-an.

Jenis film yang banyak beredar pada dekade 1980-an sampai 1990-an adalah film horor dengan bintang ikoniknya Suzzana, film drama romantis

percintaan, film komedi dengan figur terkenal seperti Benyamin dan grup Warkop DKI lalu yang baru adalah film dangdut yang terinspirasi dari film India dengan bintang ikoniknya Rhoma Irama.

Film eksploitasi juga marak bermunculan yaitu film yang sering menghadirkan adegan perkelahian sadis seperti adegan bagian tubuh yang terpotong, darah yang bercucuran. Film ini umumnya diangkat dari cerita legenda Indonesia yang penuh dengan takhayul dan mistis karenaitu film eksploitasi kerap dikaitkan dengan film horor.

Keadaan ini memunculkan angin segar bagi para pemilik bioskop karena film dengan unsur pornografi menarik banyak minat masyarakat untuk pergi menonton di bioskop. Umumnya, film Nasional dengan unsur pornografi banyak ditayangkan di bioskop kelas menengah kebawah dengan harga tiket masuk yang murah selain bioskop masyarakat kala itu juga mengenal bioskop keliling atau yang akrab disebut layar tancap.

Sinepleks 21 milik Sudwikatmono berdiri pada tahun 1987 dan hadir sebagai bioskop moderan kelas menengah ke atas dengan lokasi yang berada di Mal bioskop Sinepleks 21 menawarkan ruang menontondengan teknologi canggih seperti sistem audio yang menggunakan *dolbystereo system*. Bioskop ini biasanya menayangkan film-film impor.

Badan Sensor Film yang sewaktu itu menjadi alat kontrol pemerintah dalam peredaran perfilman seolah memiliki kebijakan yang membingungkan karena gunting sensor mereka serasa tajam pada film- film yang mungkin membahayakan rezim Orde Baru tapi menjadi tumpul pada film-film yang

mengandung unsur pornografi. Banyak pendapat yang dilontarkan atas kejadian ini seperti Badan Sensor Film memang tidak bisa mengalahkan selera pasar kala itu (Iswahyuningtyas, 2015)

Film-film dengan unsur pornografi yang berkembang pada masa Orde Baru sangat mudah ditebak. Terlihat dari poster-poster yang dibuat sedemikian rupa menampilkan gambar dengan unsur pornografi hal ini juga didukung dari judul-judul yang dibuat sengaja membuat masyarakat penasaran dengan isi film tersebut seperti *Kenikmatan Tabu, Gairah Malam, Inem Pelayan Sexy* dan lain sebagainya.

Maraknya unsur pornografi ini juga memunculkan istilah baru yaitu *bomb seks* sebutan bagi artis-artis yang berani beradegan seks dan memakai pakaian terbuka. Pada kurun waktu 1980-an sampai 1990-an *bomb seks* terkenal melekat pada nama diantaranya Meriam Bellina, Yurike Prastika, Inneke Koesharawati, Malfin Shayna, Kiki Fatmala.

Krisis perfilman mulai muncul di akhir tahun 1980-an dimulai dengan kemunculan stasiun televisi swasta yang cukup menarik perhatian masyarakat karena menayangkan film impor secara gratis. Selanjutnya kemunculan VCD bajakan yang dijual murah di pasaran juga menjadi awal munculnya krisis perfilman era Orde Baru.

Keadaan ini memburuk pada tahun 1990-an ketika pemerintah memberi keluwesan terhadap perusahaan film untuk mengatur peredaran perfilman. Akibatnya terjadi monopoli perfilman yang dilakukan pengusaha-pengusaha besar yang meraup keuntungan berlipat dengan cara memiliki perusahaan berbeda.

Sudwikatmono sepupu Presiden Soeharto sekaligus pemilik Cinepleks 21 adalah salah satu pengusaha besar yang melakukan monopoli pada film impor dimana diamemiliki tiga perusahaan berbeda atas namanya.

Keluwesan pemerintah membuat peredaran film tidak merata danbeberapa bioskop menengah ke bawah terpaksa gulung tikar karena tidak ada pasokan film untuk ditayangkan begitu juga dengan penontonyang semakin sedikit.

Dalam masa krisis film-film Nasional yang dibuat semakin tidak berkualitas karena dananya sedikit. Film ini dibuat dengan unsur pornografi yang lebih eksplisit daripada masa sebelumnya hal ini tidak lain bertujuan menarik penonton. Seperti contoh pada film *Gairah Malam* yang menjadi fenomena pornografi pada dekade 1990-an menampilkan adegan seks dalam durasi yang cukup lama.

Maraknya unsur pornografi pada perfilman Orde Baru terutama pada dekade 1980-an dan 1990-an memunculkan banyak reaksi dalam lapisan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia pernah menyoroti secara tajam kinerja Badan Sensor Film yang masih meloloskan film- film dengan unsur pornografi. Bahkan di beberapa daerah ulama memprotes poster-poster film yang beredar di daerahnya dan melarang film tersebutberedar.

Orang film yaitu orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film dari produser hingga pekerja teknis film juga memiliki reaksi yangberagam mulai dari reaksi yang menerima saja film dengan unsur pornografi dengan alasan keuntungan dan reaksi lain yang tetap mempertahankan idealismenya untuk membuat film yang bagus.